

Daftar Pustaka

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-18, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- HS. Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika 2019.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Qodariah Barkah, *Perlindungan Hukum*, Doki Course Training, Sumatera Selatan, 2024.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, CV, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

C. JURNAL ILMIAH

Adi Mansar, “Siapa Yang Berkewajiban Dalam Membuat Pencarian Orang, Red Notice, Cekal,” *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1 No. 1, 2022.

Agus Raharjo, “Problematika Penetapan Daftar Pencarian Orang dalam Proses Penyidikan Pidana,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 27, No. 1, 2020.

Ahmad Rifai, “Fungsi Organisasi Profesi dalam Penegakan Kode Etik Notaris,” *Jurnal Notariat dan Regulasi*, Vol. 7 No. 1, 2021.

Bambang Waluyo, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tersangka yang Melarikan Diri,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 2, 2018.

Dian Eka Putri, “Kedudukan Daftar Pencarian Orang dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, No. 4, 2020.

Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Elvina, Mella. Akibat Hukum Salah Penetapan Status DPO Oleh Penyidik (Studi Putusan No. 20/Pra.Per/2015/PN.SBY), UMSU Library, 2018.

- Erdianto Effendi, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penetapan Daftar Pencarian Orang," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Habib Adjie, "Eksistensi Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- I Made Widnyana, "Tanggung Jawab Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 2, 2017
- Khairunnisa, A.K., "Kedudukan dan Urgensi Pengaturan Penyampaian Protokol", *Yustisia Untirta*, Volume. 5 Nomor. 2, 2025.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007
- Maharani, C.L., "Mekanisme Pemberhentian Sementara Jabatan Notaris", *Syntax Idea Journal*, Volume. 6 Nomor. 1, 2023.
- Mansar, Adi. Siapa Yang Berkewajiban Dalam Membuat Pencarian Orang, Red Notice, Cekal. *Sanksi Fahum Unsu*, 2022.
- Meita Djohan Oe, "Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Nomor 1, 2015.
- M. Luthfan Hadi Darus, "Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 3, 2017.
- M. Syahrul, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume. 3 Nomor. 1, 2019.
- Muhammad Fadli, "Administrasi Penyidikan dalam Penetapan dan Pencabutan Status DPO," *Jurnal Ius Civile*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Putra. Dondy Permana, Implikasi Hukum Terhadap Notaris Yang Memberikan Jasa Kenotariatan Di Luar Kewenangannya, *Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Renaissance Nomor Volume 5*, 2020.
- Ramadhanty Kharisma Mufti dan Erwin Wahyudi, "Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dengan Pelaku yang Melarikan Diri," *Esensi Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2021
- R. Kusuma, "Urgensi Pengaturan Protokol Notaris yang Menolak atau Menghambat Penyerahan Protokol", *Jurnal RIO Law*, Volume. 3 Nomor. 2, 2023.

R. Soegondo Notodisoerjo, “Kedudukan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara,” *Jurnal Notariil*, Vol. 5, No. 1, 2020.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013.

Sarungu, Gabriella Tiku, “Peranan Majelis Pengawas Daerah Kota Depok dalam Menghadapi Permasalahan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kota Depok”, *Indonesian Notary*, Volume. 7 Nomor. 3, 2025.

Siti Nurhayati, “Peran Pemerintah dalam Pengawasan Notaris Pasca Perubahan UUJN,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2, 2020.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Jabatan Notaris,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7, No. 2, 2018.

Wibisono, Dwikky Bagus, Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kabupaten Tegal, *Jurnal Akta Volume 5 Nomor 1*, 2018.

Yofi Permana, “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat”, *Jurnal Cendikiawan Hukum*, Volume. 5 Nomor. 1, 2019.

Zarfinal dan Desmal Fajri, “Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pemeriksaan Protokol Notaris”, *Jurnal Jurisprudencia*, Volume. 3 Nomor. 2, 2021.

Zulfahmi Nur, “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)”, *Jurnal UMJ*, Volume. 6 Nomor. 2, 2023.

D. WEBSITE

<https://www.natamihardja.com/2025/12/konsep-officium-nobile-adiabel-body.html>, diakses pada 18 Januari 2026.

<https://koranpadang.com/hukum/bersih-bersih-profesi-notaris-kemenkum-sumbar-buru-oknum-dpo-dan-perketat-pengawasan/amp/> diakses 18 Juni 2026